

## Tata Kelola (*Collaborative Governance*) dalam Pengelolaan Sampah Organik di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya

Astrid Eka Wahyu Cahya Megananda<sup>1</sup>, M. Kendry Widiyanto<sup>2</sup>, Dida  
Rahmadanik<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>astridewcm@gmail.com, <sup>2</sup>kenronggo@untag-sby.ac.id, <sup>3</sup>didarahma@untag-sby.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze collaborative governance in organic waste management at the Recycling Center (PDU) Jambangan, Surabaya City. The research employs a descriptive qualitative method by collecting data through in-depth interviews, direct observations in the field, and relevant documentation. The findings indicate that the collaboration process between the government, the community, and Regional Owned Enterprises (BUMD), specifically PDAM Kota Surabaya in their role as Corporate Social Responsibility (CSR) executors, has been effectively implemented despite facing several challenges. Using the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash, this study finds that the success of collaboration heavily relies on facilitative leadership that can build trust and commitment among stakeholders. This collaborative process includes regular face-to-face dialogues, trust-building through transparency and openness, strong commitment to the process, continuous enhancement of shared understanding, and interim results achieved as motivation to continue the cooperation. This study concludes that collaborative governance at PDU Jambangan has made a significant contribution in reducing the volume of organic waste and enhancing public awareness of the importance of effective waste management. This success is achieved through joint efforts between the government, the community, and PDAM Kota Surabaya in creating a sustainable and environmentally friendly waste management system*

**Keywords:** Collaborative Governance; Waste Management; Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah organik di Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PDAM Kota Surabaya dalam peran mereka sebagai pelaksana *Corporate Social Responsibility* (CSR), telah berjalan dengan efektif meskipun menghadapi beberapa tantangan. Menggunakan kerangka kerja teori kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitasi yang mampu membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Proses kolaborasi ini melibatkan dialog tatap muka yang rutin, pembangunan kepercayaan melalui transparansi dan keterbukaan, komitmen yang kuat terhadap proses, pemahaman bersama

yang terus ditingkatkan, serta hasil sementara yang telah dicapai sebagai motivasi untuk melanjutkan kerja sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif di PDU Jambangan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah organik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan PDAM Kota Surabaya dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Kata kunci:** Tata Kelola Kolaboratif; Pengelolaan Sampah; Surabaya

## PENDAHULUAN

Setiap usaha manusia menghasilkan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa material aktivitas manusia sehari-hari atau proses alami. Menurut (Nurlita, 2019), ada dua kategori utama sampah: sampah organik *biodegradable* dan sampah anorganik *non-biodegradable*. Salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya, memiliki kesulitan pengelolaan sampah yang signifikan. Membangun Pusat Daur Ulang Jamangan (PDU), yang bermaksud untuk mengurangi jumlah sampah yang perlu ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, adalah salah satu proyek yang signifikan (Saibah et al., 2018).

Semakin banyak sampah menumpuk sebagai akibat dari pengelolaan limbah yang tidak memadai. Penumpukan sampah jangka panjang dapat mengakibatkan masalah lingkungan lebih lanjut seperti pemandangan dan bau yang tidak sedap, serta kemungkinan banjir dari aliran yang tersumbat (Tangkasarong, 2017). Selain itu, pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan risiko sakit, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat (Firmansyah, 2020).

Salah satu faktor dari tingginya tingkat pembuangan sampah adalah pertumbuhan cepat populasi di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan berkontribusi pada peningkatan produksi sampah (Rendy, 2015). Urbanisasi yang cepat di perkotaan juga turut meningkatkan aktivitas masyarakat di kota tersebut, sehingga peningkatan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi di negara-negara berkembang berkontribusi pada penumpukan sampah (Suyatmi & Mulasari, 2014).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ada 152,4 juta orang yang tinggal di pulau Jawa Indonesia pada tahun 2020, yang merupakan setengah dari 266,9 juta populasi keseluruhan negara itu. Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang menghasilkan jumlah sampah terbesar di Indonesia. Jawa Timur dikenal sebagai provinsi kedua terpadat setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 39.292.972 orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 (Ardiansyah, 2016). Selain memiliki jumlah penduduk yang signifikan, Jawa Timur juga merupakan wilayah yang menjadi

pusat pengembangan industri padat. Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur merilis data yang menunjukkan jumlah perusahaan di wilayah tersebut adalah 816.804.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk**

No.	Jumlah Penduduk/Jiwa	Tahun
1.	2.885.245	2018
2.	2.897.245	2019
3.	2.874.314	2020
4.	2.880.284	2021
5.	2.887.223	2022

Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi di Jawa Timur yang menyebabkannya menjadi kontributor utama dalam masalah sampah (Ardiansyah, 2016). Kota Surabaya sebagai bagian dari Jawa Timur menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan menyebabkan perluasan dan kepadatan permukiman (Affandi et al., 2015). Saat ini, Kota Surabaya telah menjadi kawasan perdagangan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan populasi penduduk di Kota Surabaya cenderung meningkat sebagaimana tergambar dari informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Selain pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah perusahaan perdagangan di Kota Surabaya pada tahun 2020 mencapai 578. Fenomena ini menjadikan Kota Surabaya sebagai magnet tersendiri bagi penduduk dari daerah lain yang memilih untuk berurbanisasi ke kota tersebut. Peningkatan populasi dan banyaknya kegiatan perdagangan di Kota Surabaya memberikan dampak signifikan terhadap volume sampah yang dihasilkan, terutama sampah organik.

Penelitian dari *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) menunjukkan bahwa sekitar 24% sampah Indonesia masih belum ditangani dengan baik. Sampah organik memiliki kontribusi signifikan dalam jumlahnya mencapai sekitar 60% (Ginanti et al., n.d.). Metode pengelolaan sampah organik yang umum digunakan dalam masyarakat seperti penguburan dan pembakaran menghadapi beberapa keterbatasan. Praktik-praktik tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran udara, penyebaran penyakit, dan polusi udara (Pratiwi, n.d.). Pertumbuhan volume sampah yang terus meningkat setiap hari memunculkan keprihatinan yang serius karena berpotensi memberikan dampak negatif yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan polusi air bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan (Sari, 2018)

Rumah tangga diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama sampah. Aktivitas sehari-hari di rumah tangga turut berperan dalam pembentukan jumlah

sampah yang signifikan, terutama meliputi sisa makanan, kemasan, minyak bekas, dan lain sebagainya. Sebagian besar sampah dari dapur termasuk dalam kategori sampah organik. Kesadaran dari rumah tangga untuk mengurangi sampah dapur dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mengurangi total timbunan sampah yang mencemari lingkungan (Firmansyah, 2020)

Pengelolaan sampah berhubungan erat dengan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan aspek lainnya. Ketidakmampuan dalam manajemen sampah, baik dari rumah tangga maupun bisnis, dapat merusak progres pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta dapat menimbulkan penyebaran penyakit dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, penanganan sampah yang terarah dan efektif, termasuk praktik daur ulang, bisa menjadi poin prestasi tersendiri bagi suatu wilayah, memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat kurang mampu, dan menjadi contoh bagi tata kelola yang efisien. Pengelolaan sampah yang baik dan terencana bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari campur tangan yang bertujuan dari pihak-pihak terkait yang ingin mencapai perubahan positif dalam manajemen sampah. Pada beberapa kasus, campur tangan ini dimulai dengan penilaian dan proses perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi saat ini dan mengevaluasi keberhasilan implementasinya.

Pengelolaan sampah sangat penting, terutama yang berkaitan dengan sampah pasar, yang merupakan faktor utama tingginya jumlah sampah organik di Indonesia (Sudrajat, 2006). Lima sampai delapan ton sampah organik diproduksi setiap hari di pasar Indonesia (Suthar S., 2009). Menurut (Diener S et al., 2009), BSF, atau larva *Black Soldier Fly*, dapat menghilangkan hingga 80% sampah organik, termasuk pasar, makanan, dapur, hewan, dan bahkan kotoran manusia. Memanfaatkan larva BSF untuk pengomposan adalah cara cerdas dan cerdas untuk membantu sistem pengelolaan sampah memecah sampah organik. Dengan menggunakan teknik ini, lebih sedikit sampah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah dan sisa sampah dapat didaur ulang menjadi pupuk organik.

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah berhasil menurunkan volume sampah hingga 20% meskipun populasi penduduk terus meningkat. Informasi ini terungkap dari laporan yang dipublikasikan di media *online* [suarasurabaya.net](http://suarasurabaya.net): “Pemisah sampah rumah tangga harus didahulukan, dilanjutkan dengan pengelolaan sampah organik melalui penangkaran Magot (*Black Soldier Fly*). Sebelum mengubah sampah daun menjadi kompos yang diperlukan untuk menjaga taman kota tetap terjaga.” (Sumber: Zumrotul Abidin, 2021)

Dari berita tersebut dapat dimaknai bahwa berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya termasuk pemisahan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan Magot (*Black Soldier Fly*), dan konversi sampah daun menjadi kompos untuk pemeliharaan taman kota telah berdampak signifikan. Volume sampah harian berhasil diturunkan dari 1.600 ton menjadi 1.500 ton, mengalami penurunan sebesar 20% per hari (Sumber:

Zumrotul Abidin, 2021)). Pengelolaan sampah yang baik ini tidak lepas dari upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Kebijakan Publik

Seperangkat tindakan pemerintah, apakah dilaksanakan atau tidak, yang diarahkan pada tujuan tertentu untuk mengatasi masalah publik atau melayani kesejahteraan umum secara kolektif disebut sebagai kebijakan publik. Menurut David Easton, kebijakan publik adalah "alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat," yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa itu adalah distribusi nilai yang sah di seluruh masyarakat. Kebijakan publik, menurut Laswell dan Kaplan, adalah "program yang diproyeksikan dari nilai tujuan dan praktik," yaitu, program yang dirancang untuk memenuhi tujuan nilai dan praktik tertentu.

### *Governance*

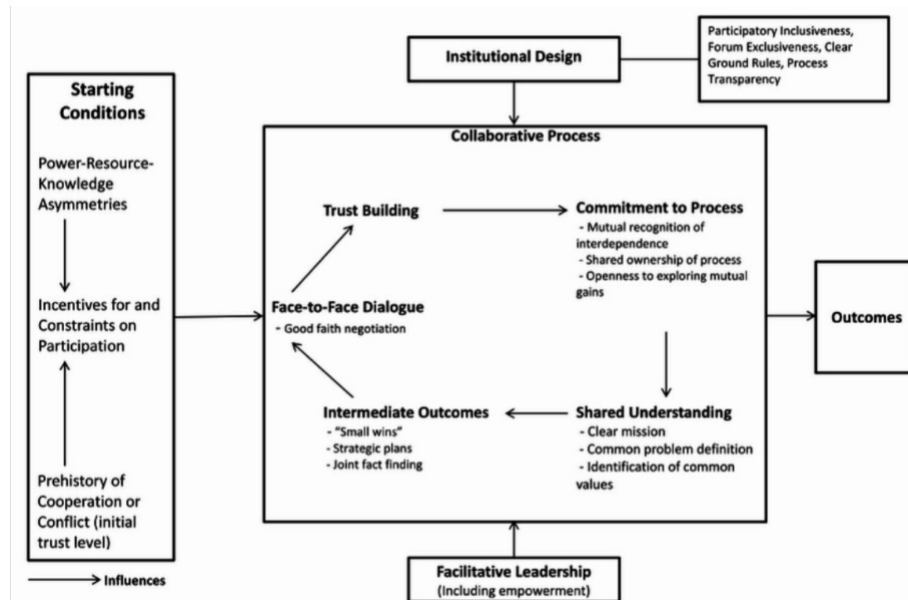
Menggunakan otoritas untuk mengelola sumber daya sosial dan keuangan untuk kepentingan masyarakat dikenal sebagai pemerintahan. "Cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk masyarakat pembangunan" adalah bagaimana Word Bank mendefinisikan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tata kelola memerlukan kerja sama antara sektor publik dan komersial dan masyarakat lokal. Wasistiono (2009) menyatakan bahwa *governance* memiliki tiga domain yaitu: negara/pemerintahan, badan usaha, dan masyarakat .

### *Collaborative Governance*

*Collaborative Governance* digambarkan sebagai berikut (Ansell & Gash, 2007) proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk mengembangkan atau menerapkan kebijakan publik, atau untuk mengelola program atau aset publik, di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara. Ketika lingkungan kebijakan berubah atau berubah, pemerintah harus beradaptasi dengan bekerja sama dengan masyarakat yang berkepentingan dan sektor bisnis. Ini dikenal sebagai tata kelola kolaboratif.

*Collaborative Governance* melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, proses kolaboratif, dan kepemimpinan fasilitatif. Kondisi awal meliputi sejarah kerja sama atau konflik sebelumnya, ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya antara pemangku kepentingan, insentif untuk berpartisipasi, serta kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Desain kelembagaan mencakup aturan dan prosedur yang mengatur proses kolaboratif.

Desain kelembagaan yang baik harus transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi .



**Gambar 1. Model Collaborative Governance Menurut Ansell and Gash**

Sumber: Ansell & Gash, 2007

Komunikasi tatap muka, mengembangkan kepercayaan, dedikasi terhadap proses, saling pengertian, dan hasil sementara adalah bagian dari pendekatan kolaboratif. Komunikasi tatap muka sangat penting untuk proses kolaboratif karena memungkinkan berbagi informasi, membangun kepercayaan, dan pembuatan kesepakatan antara para pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitatif. Membangun kepercayaan, memfasilitasi komunikasi, dan menjunjung tinggi komitmen terhadap prosedur kerja sama adalah keterampilan yang diperlukan untuk pemimpin yang efektif.

## METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah organik PDU Jambangan, pengamatan di tempat tentang prosedur pengelolaan sampah dalam tindakan, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pengelolaan sampah kota Surabaya digunakan untuk mengumpulkan data.

Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, pengelola PDU Jambangan, masyarakat setempat, dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang terlibat dalam program CSR. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam

mengenai peran masing-masing pihak dalam proses pengelolaan sampah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan pengelolaan sampah di PDU Jambangan, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah. Analisis dokumen dilakukan dengan memeriksa peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh tentang dinamika kerja sama pengelolaan sampah organik antara masyarakat, pemerintah, dan PDAM Surya Sembada. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dapat mengungkap banyak data komprehensif tentang pembentukan, operasi, dan tantangan kolaborasi ini. Peneliti juga dapat memperoleh sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah PDU Jambangan dengan menggunakan metode ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan strategi pengelolaan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan yang dimulai pada tahun 2016 dan aktif berkelanjutan sejak tahun 2017. Tujuan dari pembangunan PDU ini adalah untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya, yakni masyarakat di Kota Surabaya. Dalam pengelolaan sampah di PDU Jambangan, model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2007:544) Keadaan awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan prosedur kolaboratif adalah bagian dari paradigma Tata Kelola Kolaboratif yang diterapkan. Model ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan deskripsi rinci tentang sifat siklus dari proses kolaboratif. Praktik kolaboratif ditandai dengan komitmen bersama, kerangka kerja kelembagaan, tindakan kepemimpinan, dan kepercayaan antar aktor sebelum kolaborasi. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah sampah di PDU Jambangan dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola.

### 1. Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi di PDU Jambangan dipengaruhi oleh ketidakmerataan sumber daya dan pengetahuan antara pemangku kepentingan. Ansell & Gash (2007) menegaskan bahwa mengembangkan komitmen dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan membutuhkan awal yang kuat. Dalam situasi ini, rekam jejak niat baik dan insentif untuk partisipasi sangat membantu dalam menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak.

### 2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif memainkan peran penting dalam proses kolaboratif di PDU Jambangan. Pemimpin yang efektif mampu memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menjaga komitmen terhadap proses kolaboratif. Kepemimpinan

yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Ansell & Gash (2007) menyatakan bahwa pemimpin fasilitatif harus dapat membangun hubungan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan lancar.

### **3. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan PDU Jambangan menggabungkan kebijakan dan pedoman yang mengendalikan kegiatan koperasi, termasuk protokol pengambilan keputusan, alokasi peran dan tugas, dan teknik penyelesaian sengketa. Semua pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif akan menyadari peran dan tanggung jawab mereka berkat arsitektur kelembagaan yang adil dan transparan. Ansell & Gash (2007) berpendapat bahwa untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing, sangat penting bahwa aturan dasar harus eksplisit.

### **4. Proses Kolaborasi**

#### **a. Dialog Tatap Muka**

Proses kolaboratif di PDU Jambangan mencakup dialog tatap muka yang rutin, yang digunakan untuk saling bertukar informasi, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan terkait pengelolaan sampah. Dialog tatap muka yang intensif dan sering adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Ansell & Gash (2007) menekankan bahwa dialog tatap muka yang intensif sangat penting untuk membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan.

#### **b. Membangun Kepercayaan**

Membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan adalah elemen penting dalam proses kolaboratif di PDU Jambangan. Kepercayaan dibangun melalui keterlibatan aktif semua pihak dalam dialog dan penyelesaian masalah bersama. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, namun hasilnya adalah kemitraan yang lebih kuat dan efektif dalam mengelola sampah.

#### **c. Komitmen Terhadap Proses**

Komitmen terhadap proses kolaboratif di PDU Jambangan dicapai melalui partisipasi aktif dan kesediaan semua pihak untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Komitmen ini diperkuat oleh kepemimpinan yang efektif dan struktur kelembagaan yang mendukung keterlibatan semua pemangku kepentingan.

#### **d. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan dicapai melalui komunikasi yang jelas dan terbuka. Dialog tatap muka yang rutin membantu

memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah di PDU Jambangan.

## e. Hasil Sementara

Hasil sementara dari penerapan tata kelola kolaboratif di PDU Jambangan menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan sampah organik dan pengurangan volume sampah yang dibawa ke TPA. Kolaborasi antara pemerintah, PDAM Surya Sembada, dan masyarakat telah menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam mengelola sampah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa tantangan yang tersisa, tata kelola kolaboratif di PDU Jambangan telah sangat berhasil. Kurangnya informasi masyarakat mengenai cara yang tepat untuk memilah sampah pada sumbernya adalah salah satu tantangan utama. Namun, ada peningkatan nyata dalam jumlah sampah yang dibuang ke TPA karena kerja sama antara masyarakat, PDAM Surya Sembada sebagai CSR bersama DLH Kota Surabaya.

Kepercayaan pemangku kepentingan telah didukung oleh fondasi yang kuat, rekam jejak kolaborasi konstruktif, dan insentif yang terdefinisi dengan baik untuk keterlibatan. Semua pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif menyadari peran dan tugas mereka berkat arsitektur kelembagaan yang adil dan transparan.

Proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka yang intensif telah memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling bertukar informasi, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan. Kepemimpinan fasilitatif yang efektif telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menjaga komitmen terhadap proses kolaboratif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model *Collaborative Governance* di Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan, Kota Surabaya, efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah organik dan mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA. Keberhasilan ini dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, PDAM Surya Sembada, dan masyarakat, didukung oleh kepemimpinan yang efektif dan proses kolaboratif yang intensif. Kondisi awal yang baik dan insentif yang jelas membantu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Desain kelembagaan yang transparan dan adil memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah. Oleh karena itu, disarankan agar upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pemilahan sampah ditingkatkan. Pemerintah dan PDAM Surya Sembada perlu mengadakan program edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan meningkatkan fasilitas di PDU Jambangan. Pemangku kepentingan juga disarankan untuk terus mengadakan dialog tatap muka rutin untuk menjaga

komunikasi dan kepercayaan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi edukasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi tata kelola kolaboratif di bidang pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Fatmawati, F., & Ma'ruf, A. (2015). PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.117>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah, D. (2016). Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, 4(2), 188–198.
- Diener S, Zurbrügg C, & Tockner K. (2009). Konversi Bahan Organik Oleh Larva Lalat Black Soldier Untuk Menetapkan Tingkat Pemberian Makan Yang Optimal. *Pengelolaan & Penelitian Sampah*, 27, 603–610.
- Firmansyah, A. (2020). Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Melalui Inovasi Maggot (Synergy Of The Community Empowerment Program Based On Environment Through Maggot Innovation). *Jurnal Resolusi Konflik*, 5(1), 63–70.
- Ginanti, A., Yonathan, T., & Kusuma, T. (n.d.). APLIKASIA: *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Implementasi Teknologi Black Soldier Fly Larvae (BSFL) untuk Pengolahan Sampah Organik di Desa Susukan, Banyumas*.
- Nurlita. (2019). *SAMPAH ORGANIK & ANORGANIK : Pengertian, Sumber, dan Jenisnya*.
- Pratiwi, S. H. (n.d.). Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Agen Biokonversi Black Soldier Fly untuk Mengatasi Limbah Rumah Tangga. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia (JAPI)*, 6(1).
- Rendy, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 73–79.
- Saibah, B. R. A. M., Marlina, W. A., Faisal, R. F., Agestayani, A., Erizal, E., Susiana, S., Srivani, M., Ahmad, F. A., & Jauharry, J. (2018). PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH PADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS 2 UNAND, PAYAKUMBUH. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 1(4b), 274–284. <https://doi.org/10.25077/hilirisasi.1.4b.274-284.2018>

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 11 (2024) 4835 – 4845 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: 10.47476/reslaj.v6i11.3338

- Sari, D. E. K. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017. *JOM FISIP*, 5(11).
- Sudrajat. (2006). *Mengelola Sampah Kota*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Suthar S. (2009). Vermikompos sampah pasar sayuran dengan *Eisenia fetida*: Dampak bahan bulking terhadap pertumbuhan cacing tanah dan laju dekomposisi. *Ecoleng*, 35 (1), 914–915.
- Suyatmi, & Mulasari, S. (2014). PERBANDINGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA WUKIRSARI GUNUNGKIDUL DAN TPA BANYUROTO KULON PROGO. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(4), 7–13.
- Tangkasarong. (2017). *Dampak Sampah Terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Ekonomi*.
- Zumrotul Abidin. (2021, February 22). *Volume Sampah di Surabaya Diklaim Turun 20 Persen Per Har*. Suarasurabaya.Net.